

Fathering Japan : Strategi Jepang Dalam Mencapai Kesetaraan Gender Sebagai Respon Terhadap Kritik PBB

Fathering Japan: Japan's Strategy for Achieving Gender Equality in Response to UN Criticism

Rudiono¹, Havidz Ageng Prakoso²

^{1),2)} Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia.

*Corresponding Author

e-mail: havidz@umm.ac.id

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang strategi Jepang dalam mencapai kesetaraan gender sebagai respon terhadap kritik PBB melalui Ikumen Project/ NPO Fathering Japan. Kondisi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan masyarakat Jepang telah menghasilkan perhatian dunia dan juga mendapati kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui CEDAW (The Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Woman). Hal tersebut dikarenakan masih tingginya penerapan nilai-nilai budaya konvensional masyarakat Jepang yang biasa disebut dengan budaya patriarki. Maka dari itu, Teori dan Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gender Empowerment dimana melihat pada upaya-upaya aktor negara melalui pemerintah dalam memperdayakan kaum laki-laki dan perempuan, Civil Society dengan melihat pada peranan penting kelompok masyarakat sipil dalam menghadapi tren isu pada suatu negara dan konsep Non-Profit Organization yang melihat pada sejarah keterlibatan NPO dalam menangani beberapa permasalahan di dalam negeri. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data dari sumber sekunder, buku-buku, skripsi dan tesis, jurnal dan artikel dari sumber online. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi kaum laki-laki dalam pengasuhan anak pada tahun 2017. Hal tersebut merupakan hasil dari eksistensi kerjasama pemerintah Jepang dan NPO Fathering Japan sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggeser nilai-nilai budaya konvensional, yakni patriarki yang telah menjadi penyebab utama ketidaksetaraan gender hingga mendapatkan kritikan dan desakan dari beberapa panel PBB untuk segera mengatasi isu terkait dan menuju pencapaian kesetaraan gender.

Kata kunci : Civil Society, Gender Empowerment, Ikumen Project, NPO Fathering Japan, Pemerintah Jepang.

Abstract

This journal aims to explain Japan's strategy in achieving gender equality in response to UN criticism through the Ikumen Project/ NPO Fathering Japan. The condition of gender inequality in Japanese society has generated worldwide attention and has also received criticism from the United Nations (UN) through CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). This is due to the high application of conventional cultural values of Japanese society which is commonly referred to as patriarchal culture. Therefore, the theory and concept used in this research is Gender Empowerment which looks at the efforts of state actors through the government in empowering men and women, Civil Society by looking at the important role of civil society groups in dealing with content trends in an organization. Countries and the concept of the Non-Profit Organization which looks at the history of the involvement of NPOs in dealing with several problems in the country. The author uses qualitative research and descriptive research by collecting data from secondary sources, books, theses and theses, journals and articles from online sources. The results of the study show that the increased participation of men in child care in 2017. This is the result of the existence of cooperation between the Japanese government and NPO Fathering Japan as an effort to increase public awareness to shift conventional cultural values, namely patriarchy

which has become the main cause gender inequality to get criticism and pressure from several UN panels to immediately address the related issues and towards the achievement of gender equality.

Keyword: Civil Society, Gender Empowerment, Ikumen Project, NPO Fathering Japan, Japan's Government.

1. PENDAHULUAN

Jepang merupakan negara yang dominan dalam hal modernisasi dan sejarah yang menarik untuk dibahas. Negara tersebut mampu untuk bangkit dari kehancuran yang signifikan ketika mengalami kekalahan pada Perang Dunia II. Peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki yang dialami Jepang telah meninggalkan berbagai kerusakan dan kehancuran di berbagai bidang, beberapa diantaranya ialah krisis ekonomi dan banyaknya kematian penduduk, hal tersebut secara otomatis membuat Jepang mengalami perubahan pada sektor tatanan ekonomi dan kependudukan. Kemampuan Jepang untuk bangkit diawali dengan strategi reformasi ekonomi berupa kebijakan luar negeri dalam bentuk diplomasi ekonomi yang diformulasikan oleh PM Shigeru Yoshida (1). Pada tahun 1970, upaya Jepang dalam menuju perekonomian nasional yang kuat telah tercapai. Hal tersebut ditandai oleh merebaknya produk-produk elektronik dan otomotif seperti, *Toshiba, Panasonic, Honda, Suzuki*, dan lain-lain di Kawasan Eropa dan Asia Tenggara. Pencapaian tersebut sangat terlihat dengan karakter masyarakat Jepang yang memiliki budaya etos kerja tinggi dan dukungan pemerintah Jepang melalui prinsip “bekerja adalah perang” sebagai faktor utama terhadap pencapaian ekonomi tersebut (2).

Terdapat dampak negative dibalik keberhasilan Jepang dalam meningkatkan daya ekonomi nasionalnya, yakni negara tersebut harus menanggung beberapa konsekuensi seperti pergeseran dan perubahan pada berbagai aspek kehidupan, terutama aspek sosial. Modernisasi Ekonomi Jepang telah mengakibatkan perubahan sosial diantaranya merenggangnya ikatan di masing-masing keluarga, pergeseran hidup kebersamaan beralih pada individualisme, hegemoni kapitalisme yang menyebabkan berkurangnya kepekaan sosial hingga penurunan angka kelahiran (2). Hal tersebut dikarenakan tidak adanya upaya-upaya yang signifikan dalam mengatasi permasalahan penduduk membuat Jepang harus menanggung dampak dan akibatnya pada saat ini. Dampak dan akibat tersebut ialah *Shoushika* atau penurunan angka kelahiran. Meningkatnya jumlah aborsi dan kehamilan diluar nikah karena pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan menjadi salah satu diantara penyebab menurunnya angka kelahiran di Jepang. Selain itu, sejak diformulasikannya kebijakan reformasi ekonomi setelah Perang Dunia II, menurunnya niat masyarakat Jepang untuk menikah dikarenakan terlalu fokus pada pekerjaan telah memberikan kesulitan dalam menanggulangi penurunan angka kelahiran di Jepang. Ditambah lagi dengan fenomena kesenjangan gender berupa kemunculan konsep *Katei* (rumah tangga) yang menegaskan bahwa kaum laki-laki dapat menjadi tolak ukur perubahan melalui peranan di ruang publik dalam tujuan pembentukan karakter masyarakat suatu negara dengan daya ekonomi maju dan modern (3).

Kondisi kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki dapat ditinjau dari kehidupan rumah tangga di Jepang. Penerapan budaya patriarki di Jepang sangat berpihak kepada kaum laki laki, yang mana kaum laki laki memiliki posisi diatas kaum perempuan menjadikan kaum mereka khususnya bagi para ayah tidak peduli terhadap rumah tangga, anak dan keluarga (3). Oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwa tradisi patriarki merupakan penghalang utama bagi terciptanya kesetaraan gender. Pada tahun 2009 Jepang memperoleh kritik dari PBB, hal ini disebutkan dalam dokumen *CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)* bahwa terdapat kesenjangan gender yang

tinggi antara kaum perempuan dan laki-laki di Jepang. CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan IMF (*International Monetary Fund*). CEDAW mengkritik melalui dokumen sesi ke 44 *working group* yang mengusung tema *Gender Discrimination and Women Rights* pada tahun 2009.

“...that no temporary special measures are in place to accelerate de facto equality between men and women or to improve the enjoyment by women of their rights in the State party, in particular with regard to women in the workplace and the participation of women in political and public life (4) ”.

Selain itu, CEDAW juga mendesak Jepang untuk mengupayakan kesetaraan kehidupan kerja antara kaum laki-laki dan perempuan melalui peningkatan partisipasi kaum laki-laki dalam pengasuhan anak (5).

Dalam menanggapi kritik beserta desakan PBB yang diwakili oleh CEDAW terkait dengan ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan khususnya kesenjangan yang terjadi pada bidang pekerjaan dan rumah tangga pada tahun 2009, pemerintah Jepang telah memformulasikan dan mengkampanyekan kebijakan *Ikumen Project* pada tahun 2010 (3). Maksud daripada *Ikumen Project* ialah proyek pengasuhan anak oleh ayah dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesetaraan gender serta mengubah peran gender dari budaya tradisional Jepang (6). Dalam hal ini, *NPO Fathering Japan* sebagai organisasi atau komunitas ayah paling terkemuka di Jepang, pemerintah menunjuk Tetsuya Ando yang merupakan pendiri dari *NPO Fathering Japan* sebagai ketua asosiasi *Ikumen Project* di seluruh wilayah dalam negeri Jepang (6). *Fathering Japan* adalah komunitas sosial atau organisasi non-profit yang bertujuan untuk mengubah perspektif mengenai peran ayah di keluarga, yang sebelumnya peran mayoritas ayah di Jepang adalah seorang pekerja yang tidak memperdulikan keharmonisan keluarga karena terlalu fokus dengan pekerjaan. NPO (*Non-Profit Organization*) *Fathering Japan* didirikan oleh Tetsuya Ando pada 27 November 2006 yang bermarkas di Tokyo dan beranggotakan lebih dari 400 orang (7). Organisasi ini bergerak pada segala bidang sosial, yakni pendidikan, pengasuhan anak dan pemberdayaan terhadap seluruh lapisan masyarakat Jepang. Organisasi ini berdiri di tengah isu-isu yang menimpa masyarakat Jepang, diantaranya isu gender, pelecehan anak, kekerasan dll. Disamping itu, hubungan antara Organisasi Non-Profit dan Pemerintah seperti menunjukkan bahwa pemerintah bergantung pada Organisasi tersebut guna menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di Jepang.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah “bagaimana strategi Jepang dalam mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan *Ikumen Project* (proyek pengasuhan anak oleh ayah) dan *Fathering Japan* sebagai respon terhadap kritik PBB?. Kemudian dengan mengkaji lebih dalam mengenai pemerintah Jepang dan komunitas *Fathering Japan* berdasarkan tema kesetaraan gender, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dan *Fathering Japan* dalam mengatasi permasalahan diskriminasi gender yang terjadi di Jepang.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Creswell, sangat penting bagi para peneliti untuk memahami apa yang diteliti dengan baik, dalam artian bahwa penguasaan materi melalui pendekatan dan paradigma yang tepat merupakan hal yang wajib dimiliki bagi setiap peneliti (8). Pada penelitian ini mengambil metode kualitatif (8), yaitu merupakan suatu metode atau cara yang dipilih dan digunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam dan memahami makna dari sejumlah permasalahan sosial termasuk juga para aktor yang terlibat. Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Dalam pandangan Sukmadinata menyebutkan bahwa

bentuk dari penelitian deskriptif adalah penggambaran dan pendeskripsian terhadap fenomena yang diteliti, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena yang dimaksud dapat berupa karakteristik, dinamika perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya (9). Yanuar Ikbah mengatakan bahwa penelitian deskriptif memiliki keistimewaan dalam mengatur sistematis pola penelitian yang berasal dari studi kasus dan pendekatan yang tepat meski seringkali dianggap sebagai penggambaran dari suatu penelitian yang sederhana (9).

Teknis dalam mengumpulkan data menjadi salah satu hal penting bagi peneliti. Mengenai hal tersebut, metode pengumpulan data memiliki fungsi dalam menjelaskan serangkaian pola penelitian dari awal hingga akhir penelitian. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui sumber data yang menjadi bagian dalam penyelesaian suatu penelitian dan peneliti dapat menjawab pertanyaan dan berpendapat sesuai dengan sumber data terkait (8). Sumber data penelitian berasal dari sumber sekunder, jurnal, buku, karya tulis ilmiah ataupun skripsi dan tesis secara daring maupun luring, hal tersebut sesuai dengan jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini (8). Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data wacana kritis. Menurut Darma, metode analisis wacana kritis dapat digunakan dengan mengacu pada sumber data yang terkait dengan sejarah, ekonomi, politik, sosial budaya dalam naskah yang sedang diteliti (10). Hal tersebut bertujuan untuk dapat menjalani proses penelitian dengan baik dan sekaligus dapat menentukan pendekatan penelitian serta membatasi guna penelitian yang konkrit dan menarik. Sumber data tersebut dapat berguna untuk menggambarkan studi kasus yang sedang diteliti dan mengarahkan arah penelitian dengan tepat.

2.1 Landasan Teori

a. Gender Empowerment

Konsep ini dapat dikatakan sebagai proses perubahan untuk menuju suatu pemberdayaan, Naila Kaaber menambahkan bahwa Pemberdayaan gender dapat dipahami sebagai pengembangan kemampuan masyarakat untuk membuat pilihan hidup strategis dalam konteks di mana kemampuan ini sebelumnya tertunda untuk mereka (11). *Gender empowerment* selalu dikaitkan dengan *women empowerment* sebagai instrument untuk mencapai kesetaraan gender. Mengenai hal tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *Gender Empowerment* dengan melihat tolak ukurnya yang mana ada peran dari berbagai lembaga pemerintahan dan kelompok atau organisasi masyarakat merupakan bagian dari strategi pemerintah itu sendiri pada suatu negara yang sedang dilanda isu-isu ketidaksetaraan gender. Isu tentang *gender empowerment* dan kesetaraan gender telah mencapai titik puncaknya ketika Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menjadikan isu tersebut sebagai fokus utama baginya pada tahun 2010 dengan menyelenggarakan *Annual Ministerial Review (AMR)* keempat dengan tema “Melaksanakan tujuan dan komitmen yang disepakati secara internasional dalam hal pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender”(12).

b. Civil Society

Gagasan *civil society* merupakan salah satu bentuk dari cita-cita penerapan nilai demokrasi yang menekankan pada kebebasan aspirasi dan hak-hak individu atas kepentingan bersama diyakini dapat membentuk dan menciptakan kehidupan yang memiliki tatanan sosial yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, konsep ini memiliki karakteristik yang khas dalam hal tatanan sosial dan sering dianggap kontras dengan teori-teori lain yang memandang bahwa tatanan sosial yang baik adalah hasil dari kekuasaan otoriter pada suatu negara (13). Jan Aart Scholte membawa sebuah pendekatan baru untuk *Civil society*. Scholte mengatakan bahwa *civil society* adalah kelompok masyarakat yang bersifat formal, namun bukan juga sebuah negara ataupun bagian dari struktur pemerintahan, *civil society* juga tidak memiliki

tujuan untuk menduduki atau menguasai lembaga-lembaga pemerintahan (14). Suatu kelompok dapat dikatakan sebagai *civil society* jika kelompok tersebut berada pada sektor non-komersial serta dalam aktivitasnya tidak mencari keuntungan. Di samping itu, kelompok-kelompok yang mencari keuntungan atau bagian dari perusahaan bisnis biasanya tidak dianggap sebagai *civil society* (14). Perlu diketahui bahwa *Civil society* juga memiliki eksistensi peranan penting dalam kehidupan masyarakat global. Eksistensi tersebut terbukti melalui peranan penting dan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi pembuat kebijakan serta menunjukkan keahlian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan isu kepada pembuat kebijakan. Selain itu, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kaum pemuda dengan meningkatkan kapasitas mereka dalam hal kepemimpinan yang tidak terarah pada pekerjaan yang diberikan oleh partai politik. Aktor dari *Civil society* bekerja secara sistematis untuk mengurangi beban kehidupan sosial dan meningkatkan tunjangan kehidupan sosial. Secara umum *Civil Society* memiliki tujuan untuk memperbaiki proses tatanan sosial, meningkatkan tingkat pembangunan ekonomi dan sosial, memberantas kemiskinan, kesehatan publik, mempromosikan kepentingan kelompok yang tersimpang, serta menuntut perlindungan hak-hak sosial, sipil dan politik (15).

c. Non-Profit Organization

Non-Profit Organization merupakan bagian dari Non-Governmental Organization dalam sektor non-profit. NPO adalah suatu wadah yang terdiri dari pihak-pihak yang bersedia, dalam hak mereka sendiri, yang didirikan oleh kehendak bebas warga negara yang terkait pada minat karir yang sama dan atau kepentingan lain bertujuan berbagi hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya dan tidak mendapatkan keuntungan (16). NPO juga merupakan bagian dari *Civil society* karena ikut andil dalam memainkan peran penting didalamnya. Penelope McPhee dan John Bare mengatakan bahwa organisasi non-profit telah memenuhi berbagai fungsi yang membantu membangun dan memelihara masyarakat sipil, selama hampir satu abad (17). Didirikannya NPO secara bebas atas kehendak suatu warga negara tidak serta merta dengan makna kebebasan itu sendiri. Di Jepang, Pemerintah ikut andil membuat Undang-Undang NPO dalam hal membagi, mendefinisikan dan mengaturnya (18). Hal-hal tersebut bertujuan untuk membangun kapasitas NPO itu sendiri dalam menghadapi tantangan isu yang akan dihadapinya dan secara otomatis juga menunjukkan adanya peran pemerintah dalam segala hal tentang NPO dan dapat dikatakan keduanya memiliki keterkaitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidaksetaraan gender merupakan suatu tren isu yang sedang dialami Jepang saat ini. Untuk itu pemerintah Jepang terus berupaya menemukan terobosan baru guna mengatasi isu tersebut. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencapai kesetaraan gender memanglah bukan persoalan yang mudah, dan tentunya pihak pemerintah tidak mampu sendirian dalam menangani hal ini. Pemerintah telah melibatkan komponen masyarakat dengan melakukan pendekatan yang tepat sasaran dan membentuk hubungan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas di bidang isu terkait. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan-dukungan signifikan terhadap kelompok atau komunitas *civil society* sehingga eksistensi dari upaya-upaya kerjasama berjalan dengan baik. Komunitas *civil society* tersebut bernama *Fathering Japan*, yang merupakan komunitas para ayah secara ter-organisir melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran kaum pria akan pentingnya peran ayah dalam urusan rumah tangga. Pada sub-bab berikutnya akan dijelaskan secara rinci mengenai korelasi antara *Fathering Japan* dan Pemerintah Jepang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencapai kesetaraan gender sebagai respon terhadap kritik PBB.

3.1 Isu Kesenjangan Gender

Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan perbedaan-perbedaan yang signifikan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, terutama pada pembangunan. Kaum perempuan tidak selalu berpartisipasi dalam merencanakan, memutuskan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi proses pembangunan (19). Patriarki merupakan sebuah sistem yang menempatkan laki-laki dewasa pada posisi sentral atau yang terpenting, sementara yang lainnya seperti istri dan anak diposisikan sesuai kepentingan *the patriarch* (laki-laki dewasa tersebut). Dalam sistem patriarki, perempuan diposisikan sebagai istri yang bertugas mendampingi, melengkapi, menghibur, dan melayani suami (*The Patriarch*), sementara anak diposisikan sebagai generasi penerus dan penghibur ayahnya (20). Patriarki adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Berlandaskan dengan konsep tersebut, masyarakat Jepang menjadikannya sebagai aturan sosial dalam menjalankan segala hal dalam kehidupan sosial masyarakat Jepang (21). Dalam hal ini, budaya patriarki menggambarkan bahwa terdapat perbedaan tingkatan antara kaum laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memiliki posisi tertinggi dalam menjalankan kehidupan, baik dalam sektor ranah kekeluargaan, masyarakat dan negara. Selain itu, mayoritas masyarakat di Jepang, penduduk pria lebih banyak daripada perempuan. Dalam keluarga, perempuan bertanggung jawab semuanya, mulai dari mengurus suami dan rumah tangga. Tugas suami hanyalah bekerja mencari nafkah. Manga dan film-film Jepang, baik setting lama maupun baru pun secara tidak langsung menunjukkan hal tersebut. Jika satu keluarga akan bepergian, maka sang istrilah yang menyiapkan semuanya. Bahkan, seorang istri harus menyiapkan pakaian suami apabila suami hendak bepergian (22).

3.2 Kritikan PBB

Menurut *The Global Gender Gap Report* pada tahun 2018, dapat dicermati bahwa Jepang merupakan negara dengan rendahnya upaya-upaya dalam pemberdayaan gender (*gender empowerment*) (23). Itu berarti bahwa Jepang masih mendapati kesenjangan gender yang signifikan di dalam negerinya. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi penyebab datangnya kritikan-kritikan secara internasional yang mengarah pada kesenjangan gender di Jepang. Kritikan tersebut dilayangkan oleh CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) melalui dokumen sesi ke 44 working group yang mengusung tema *Gender Discrimination and Women Rights* pada tahun 2009. CEDAW merupakan suatu konvensi komite yang dibentuk melalui perjanjian Internasional oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) pada tahun 1979 (24). Kritikan tersebut berbunyi :

“...that no temporary special measures are in place to accelerate *de facto* equality between men and women or to improve the enjoyment by women of their rights in the State party, in particular with regard to women in the workplace and the participation of women in political and public life ”(4).

Kritikan tersebut tertuju pada pemerintah Jepang bahwa tidak ada langkah-langkah konkrit untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender serta meningkatkan pencapaian hak-hak bagi kaum perempuan, khususnya hak-hak kesetaraan yang berkaitan dengan kaum perempuan di tempat kerja, kehidupan publik dan politik. Komite meminta pemerintah agar menjadikan realisasi kesetaraan gender sebagai focus utama dalam rangka mengatasi diskriminasi dibidang pekerjaan dan upah kerja. Hal-hal mengenai praktik pemecatan kerja secara ilegal terhadap kaum perempuan yang sedang mengalami kehamilan dan persalinan agar segera ditindak lanjuti berupa sanksi hukum terhadap lembaga-lembaga

perusahaan yang terlibat dalam praktek tersebut. Kemudian pemerintah harus mempromosikan kebijakan sebagai strategi yang mengarah pada anak-anak dan keluarga hingga peningkatan cuti pekerjaan bagi kaum laki-laki guna mengurangi beban berat kaum perempuan dalam urusan rumah tangga ataupun keluarga (4). Mengenai hal tersebut, *CEDAW* mendorong pemerintah dalam pembuatan kebijakan sebagai upaya menyeimbangkan kaum perempuan dan laki-laki dalam hal tanggung jawab keluarga dan pekerjaan dengan menggunakan mekanisme peningkatan fasilitas dan kesadaran pendidikan tentang pembagian tugas dalam pengasuhan anak (4).

3.3 Tentang NPO Fathering Japan

Di Jepang pada dewasa ini, terdapat perubahan peran ayah, (25) dimana sebagian besar dari kaum pria, terutama yang lebih tua, merasa hanya memiliki tempat di kantor pekerjaan mereka, sehingga para ayah di Jepang seolah-olah seperti kehilangan peran mereka ketika berada di rumah bersama keluarga. Kurangnya peran ayah dalam keluarga dapat mengakibatkan dampak tersendiri bagi sang anak dan seorang istri. Salah satu hal yang menjadi pemicu didirikannya NPO *Fathering Japan* adalah insiden pada tahun 2006 di mana seorang siswa sekolah menengah membakar rumahnya, hingga menewaskan ibu tirinya, adik laki-laki dan perempuannya. Setelah melewati beberapa penelusuran, motif anak tersebut ialah karena dendam yang mendalam terhadap ayahnya yang berprofesi sebagai dokter, yang menginginkan anaknya untuk mengikuti jejaknya, namun di sisi lain sang ayah secara teratur menyiksa anaknya secara fisik dan psikologis (26). NPO (*Non-Profit Organization*) *Fathering Japan* adalah Organisasi yang didirikan oleh Tetsuya Ando. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 November 2006, kemudian bergabung dengan NPO korporasi di Tokyo pada 13 Desember 2006, dan sertifikasi untuk pertama kali di Tokyo pada 29 Maret 2007 dan sekaligus menandakan bahwa organisasi ini bermarkas di Tokyo (7). Tujuan dari *Fathering Japan* adalah untuk meningkatkan kesadaran seorang dalam urusan keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak. Kesadaran tersebut akan dapat membebaskan para ayah dari tekanan pekerjaan, sehingga dapat berkomitmen dalam urusan keluarga dan peran ayah sangat diharapkan dalam menghadapi berbagai permasalahan seperti, penurunan angka kelahiran, timbulnya keresahan sosial, dan berbagai kasus kejahatan di sekitar anak-anak dan perempuan (7). Keterlibatan peran ayah pada urusan keluarga secara signifikan diyakini dapat membawa suasana kedamaian terhadap kelangsungan hidup anak-anak dan mengurangi stres yang di alami oleh para ibu sekaligus menjadi strategi atau langkah upaya dalam mencapai kesetaraan gender. Dalam mencapai tujuannya, organisasi tersebut memiliki beberapa program-program untuk meningkatkan kesetaraan gender, seperti program pemberdayaan kaum perempuan dan anak-anak serta memberikan edukasi pada kaum laki-laki akan pentingnya kesetaraan gender.

3.4 Respon Jepang Terhadap Kritik PBB

Dalam upaya merespon kritik dan desakan PBB/*CEDAW*, yang mana banyak terdapat kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan. Maka sesuai dengan desakan PBB untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Jepang merevisi undang-undang *Child and Family Care Leave*. Secara garis besar, perubahan pada revisi undang-undang tersebut ialah tentang cuti pengasuhan anak yang sebelumnya hanya boleh diambil oleh salah satu dari ayah ataupun ibu berubah dengan penambahan kebijakan pemendekan dan pembebasan jam lembur pada pekerjaan serta dapat diambil secara bersamaan oleh ayah dan ibu (27). Selain itu, pemerintah Jepang melalui MHLW (*Ministry of Health, Labour, and Welfare*) dalam meningkatkan upaya dan sekaligus sebagai langkah alternatif untuk mewujudkan prioritas ke-9 dari *Basic Plan for Gender Equality* untuk meningkatkan partisipasi kaum laki-laki dalam pengasuhan anak, pemerintah Jepang mengkampanyekan sekaligus menciptakan *Ikumen Project* tahun 2010 (28) yang

memiliki arti *Iku* (mengasuh) dan *men* (pria), (3) sebuah istilah dalam meningkatkan partisipasi kaum pria untuk lebih berperan dalam urusan rumah tangga, terutama dalam pengasuhan anak. *Ikumen Project* yang merupakan strategi pemerintah Jepang dalam menghadapi isu kesenjangan gender dan dalam rangka mencapai kesetaraan gender serta merespon kritik dari PBB. Tercetusnya *Ikumen* juga merupakan sebuah upaya pemberdayaan lanjutan dalam mendorong perubahan peran laki-laki untuk memajukan taraf kehidupan kaum perempuan atau biasa disebut dengan pemberdayaan gender (*Gender Empowerment*) dan sekaligus upaya untuk terus mempromosikan *Work-Life Balance* baik untuk laki-laki dan perempuan sebagai simbol kehidupan masyarakat Jepang dalam menuju kesetaraan gender.

3.5 Fathering Japan Sebagai Strategi Jepang dalam Mencapai Kesetaraan Gender Sebagai Respon Terhadap Kritik CEDAW/PBB.

NPO *Fathering Japan* sebagai strategi Jepang dalam mencapai kesetaraan gender dapat ditinjau dari hubungan kerjasama antara *Fathering Japan* dan pemerintah Jepang. Keterlibatan pemerintah Jepang diawali tercetusnya *Ikumen Project* yang menjadi salah satu dukungan untuk organisasi *Ikumen*, khususnya *Fathering Japan*. Kemudian hubungan kerjasama antara pemerintah Jepang dengan NPO *Fathering Japan* semakin diperkuat dengan diselenggarakannya rapat kerja sama promosi kesetaraan gender yang bertepatan di Kantor Kabinet Pemerintah Jepang pada 13 Juni 2011 (3). Rapat tersebut membahas tentang aktivitas dan efek proyek dukungan pengasuhan anak oleh ayah, dan menghasilkan 7 poin terkait dengan mengapa pentingnya *Ikumen* saat ini. Diantaranya sebagai berikut :

“Menurunnya angka pernikahan dan kelahiran, Meningkatnya angka perceraian, Neurosis perawatan anak, pelecehan dan masalah pendidikan, Diversifikasi model keluarga, Disfungsi komunitas local, Ekonomi menyusut, Mengubah peran gender dari budaya dan gaya kerja tradisional untuk kemajuan kaum perempuan dalam masyarakat (6)”.

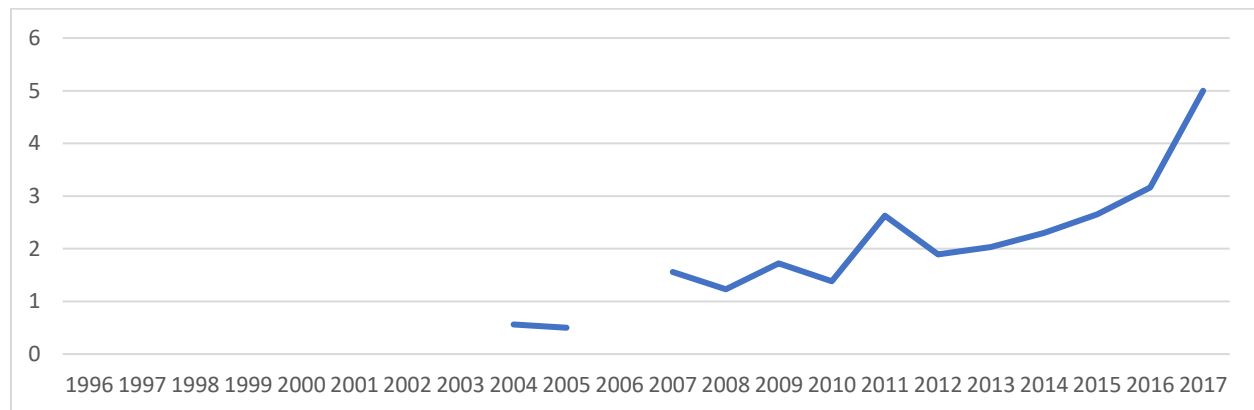
Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan diatas, menunjukkan bahwa Pemerintah Jepang telah merespon kritikan PBB melalui upaya-upaya seperti revisi undang-undang cuti pengasuhan anak, kemudian dilanjutkan dengan menciptakan *ikumen project* sebagai simbol pendekatan negara menuju pemberdayaan dan kesetaraan gender dengan menargetkan kaum laki-laki sebagai strategi utama. Selain itu, Pemerintah memiliki kerjasama erat dengan Organisasi *ikumen* terkemuka di Jepang bernama NPO *Fathering Japan* yang memiliki tujuan sama dalam meningkatkan kesadaran *stereotip* budaya tradisional Jepang dan merubah peran gender dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga guna meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Rencana penyusunan kebijakan *gender equality* juga telah disahkan dalam *The Third Basic Plan for Gender Equality* sesuai dengan desakan dan kritikan PBB.

Selanjutnya, pada tahun 2015 keterlibatan pemerintah pada program *ikuboss* yang di cetuskan oleh NPO *Fathering Japan* tahun 2014 merupakan upaya lanjutan untuk memberikan dukungan penuh sekaligus memberikan fasilitas kepada *Fathering Japan* dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui mekanisme pengambilan cuti pengasuhan anak. Program ini fokus pada upaya-upaya mempengaruhi para petinggi dan pemimpin perusahaan agar memberikan akses kemudahan bagi para karyawan yang ingin mengambil cuti pengasuhan anak (29). Terbentuknya program *Ikuboss* dilatarbelakangi oleh kondisi para karyawan yang mengalami kesulitan pada pengambilan cuti pengasuhan anak di masing-masing perusahaan tempat mereka bekerja. Hal tersebut terbukti dengan data yang menunjukkan bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang memperlambat proses pengambilan cuti pengasuhan anak. Para karyawan tersebut sering mendapatkan respon negatif dari para petinggi perusahaan ketika hendak berkeinginan untuk mengambil

cuti pengasuhan anak (3) Program ini telah berhasil menyita perhatian masyarakat dan dianggap berhasil dalam upaya meningkatkan partisipasi kaum laki-laki dalam pengasuhan anak. Keberhasilan *Fathering Japan* tentunya tidak bisa lepas dari jaringan koneksi hubungan yang baik antara *Fathering Japan* dengan media berserta masyarakat dan pemerintah (29).

Keberhasilan antara *Fathering Japan* dan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi kaum pria dalam pengasuhan anak tidak lepas dari karakternya yang memiliki gaya kepemimpinan karismatik, dan memiliki koneksi yang baik dengan media serta dukungan pemerintah. Pada tahun 2013, dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh *Fathering Japan*, salah satu petinggi *Fathering Japan* menegaskan bahwa “...I want to break the traditional way of thinking of men at work and women at home. Totally smash it” (29). Hal tersebut menunjukkan bahwa *Fathering Japan* sangat serius dalam mengubah pola pikir kaum pria untuk bersedia terjun dalam urusan domestik rumah tangga, khususnya dalam pengasuhan anak. Secara garis besar, tindakan yang mendukung kaum pria sebagai ayah untuk bersedia mengasuh anak dan mengambil cuti perkerjaan dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara ayah dan anak serta berkontribusi terhadap kesetaraan gender dalam keluarga dan kehidupan kerja (29).

Grafik 1 Pria Mengambil Cuti Dalam Mengasuh Anak (dalam persen)



Source: <https://www.nippon.com/en/features/h00340/>

Grafik 5 berasal dari survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan tentang Kesetaraan Gender dalam Manajemen Ketenagakerjaan di Jepang (30). Hal tersebut menunjukkan peningkatan terhadap partisipasi kaum laki-laki dalam pengambilan cuti pengasuhan anak. Peningkatan terjadi pada tahun 2011 sebanyak 3% dan 2017 dengan angka 5%. Pada tahun 2011 merupakan peningkatan yang sangat positif yang mana merupakan tahun pertama bagi program dukungan cuti pengasuhan anak oleh *Fathering Japan* yang diluncurkan pertama kali tahun 2010. Selain itu, pada tahun 2010 juga ber-tepatan dengan upaya pemerintah Jepang dalam mengkampanyekan *Ikumen Project* atau pengasuhan anak oleh ayah (3). Berdasarkan hal-hal tersebut, upaya serius *Fathering Japan* dan pemerintah Jepang telah berhasil positif pada tahun 2011. Meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan dan naik kembali hingga tahun 2017, ini merupakan hal yang wajar ketika banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi *Fathering Japan* dalam mengkampanyekan cuti pengasuhan anak guna kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender. Mengingat bahwa menyadarkan suatu kaum bukan hal yang mudah,

jelas membutuhkan upaya signifikan dan waktu yang tepat seiring dengan kondisi masyarakat. Secara keseluruhan, dengan meninjau hasil peningkatan partisipasi kaum pria dalam mengambil cuti pengasuhan anak, hal ini tidak bisa lepas dari peran *Fathering Japan* dan pemerintah yang terus berupaya untuk menghapus budaya tradisional dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender.

4. KESIMPULAN

Modernisasi merupakan faktor utama dari perubahan yang menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat Jepang. Modernisasi telah memberikan ruang transformasi positif terhadap pengakuan yang memberikan tempat pada kaum perempuan Jepang untuk ikut andil menjadi bagian dari modernisasi tersebut, namun disisi lain memiliki hambatan yang telah kokoh sebelumnya, yakni budaya patriarki. Alasan rasionalitas yang dikedepankan oleh modernisasi telah mendorong masyarakat dalam menimbulkan kelompok-kelompok resistensi terhadap budaya konvensional tersebut. Penerapan budaya patriarki yang signifikan telah menimbulkan kesenjangan pada kehidupan masyarakat Jepang yang mana banyak sekali ditemukan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Jepang. Hal tersebut juga mengakibatkan Jepang memperoleh kritik dan desakan untuk segera mengatasi isu diskriminasi gender dari kalangan internasional seperti salah satu panel PBB yang bernama *CEDAW* pada tahun 2009.

Kritikan dan desakan PBB terkait isu ketidaksetaraan gender kemudian secara langsung mendapat respon dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang melakukan revisi pada undang-undang pengasuhan anak yang juga merupakan salah satu hal dari desakan PBB yang mana *CEDAW* telah menemukan kesenjangan gender pada rana kehidupan keluarga. Setelah merevisi undang undang *Child and Family Care Leave*, Pemerintah Jepang juga menciptakan kebijakan *Ikumen Project* yang menyuarakan kepada masyarakat untuk membuat komunitas pengasuhan anak oleh kaum ayah. Salah satu kelompok yang dimaksudkan ialah kelompok yang justru dari kaum laki-laki sendiri yang kemudian membentuk sebuah komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan kesetaraan gender. Fenomena *Ikumen* merupakan strategi pemerintah Jepang dalam menangani isu ketidaksetaraan gender dengan melibatkan kaum laki-laki sebagai aktor utama dalam hal ini. NPO *Fathering Japan* memiliki tujuan meningkatkan kesadaran kaum pria untuk lebih berperan dalam urusan domestik keluarga dan rumah tangga serta mengurangi beban kaum perempuan yang selama ini telah menutupi ruang kebebasan mereka dalam kehidupan masyarakat Jepang. Eksistensi dari NPO *Fathering Japan* telah berhasil menghimpun perhatian dan dukungan masyarakat dan pemerintah, sehingga menghasilkan kerjasama yang erat dengan pemerintah dalam menangani isu ketidaksetaraan gender. Dalam menangani isu ketidaksetaraan yang mana juga melibatkan kritikan dari PBB melalui *CEDAW* atas diskriminasi terhadap kaum perempuan di Jepang, keberadaan kaum laki-laki sebagai aktor pelaksana yang bekerjasama dengan pemerintah merupakan strategi pemerintah Jepang dalam menghadapi isu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasri, P. P. (2013). Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine: Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara Pasca-Perang Dunia II. *Glob Al & Policy Journal of International Relations*, 1(1), 39–46.

Widarahesty, Y., & Ayu, R. (2014). Fenomena Penurunan Angka Kelahiran di Jepang Pasca Perang Dunia II Sampai 2012. *177 Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 2(3), 177–197.

Muhayaroh, I. (2015). Fenomena Ikumen sebagai Salah Satu Perubahan Peran dan Identitas Ayah dalam Masyarakat Jepang Modern. *Lingua Cultura*, 9(2), 100. <https://doi.org/10.21512/lc.v9i2.823>

Nations, U. (1988). Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. *Annual Review of Population Law*, 15(August), 148. <https://doi.org/10.32380/alrj.v0i0.1343>

Chinkin, C. (2016). The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. *Handbook on Gender in World Politics*, 30006(April), 145–152. <https://doi.org/10.4337/9781783470624.00025>

Japanese Gender Equality Bureau, *Fathering Japan*, Cabinet Office of Japan Government. From: http://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/subcommittee/positive_action/02/pdf/mat01.pdf.

JAPAN, F. (2021). *FJ事業ビジョン ~FJが考えていること~*. NPO Fathering Japan. <https://fathering.jp/about/index.html>

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Reflika Aditama.

Ikbar, Y. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. PT. Reflika Aditama.

Beti Winanjar Wati. (2014). *Analisis wacana kritis berita sosial dan politik surat kabar kedaulatan rakyat*. 131.

Ryan, B. (2007). *Gender Mainstreaming and Empowerment*. August. http://www.bioenv.gu.se/digitalAssets/954/954187_ryan.pdf

United Nations. (2010). The fourth domain for gender equality, decision-making and power. In *Achieving Gender Equality, Women's Empowerment and Strengthening Development Cooperation*.

Prof, S., Maffattone, S., & Gentile, V. (2013). *The Discourses on the Civil Society and the State in the context of European and Post- colonial Narratives : Re-conceptualizing the Civil Society in Pakistan*.

Scholte, J. A. (1999). Global Civil Society: Changing the World? *CSGR Working Paper*, 31/99, 1–35.

Carothers, T. (1999). Civil society think again. *Foreign Policy*, 117, 18–29. <https://doi.org/10.2307/1149558>

Agriculture, C. (1988). *The Role and Importance of Residues*. 14, 14–19.

Backer, T. E. (2001). Strengthening Nonprofits: Foundation Initiatives for Nonprofit Organizations. *Building Capacity in Nonprofit Organizations*, 33. http://www.urban.org/UploadedPDF/building_capacity.PDF

Shigeru, T. (2003). The Emergence of NPOs and the Implications for Local Governance. *Japan's Road to Pluralism: Transforming Local Communities in the Global Era*. Tokyo: Japan Center for International Exchange, 1868, 161–78. http://www.jcie.org/researchpdfs/RoadPluralism/pluralism_tamura.pdf

Admin. (2011). *KESENJANGAN GENDER*. Koalisi Perempuan Indonesia. <https://www.koalisiperempuan.or.id/2011/05/04/kesenjangan-gender/>

Nurmila, N. (2015). Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya. *Karsa*, 23(1), 1–16.

Simorangkir, M. C. S. (2017). *Feminisme Pada Masa Meiji Di Jepang*.

Roosiani, I. (2017). Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Jepang. *Wahana*, 1(13), 70–79. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/download/672/575>

World Economic Forum. (2018). 2018 The Global Gender Gap Report. In *World Economic Forum*.

Kantola, J., Squires, J., Chappell, L., Lovenduski, J., Mazur, A., True, J., Verloo, M., & Weldon, L. (2014). Gender Equality Norms in Regional Governance. In *Gender Equality Norms in Regional Governance*. <https://doi.org/10.1057/9781137301451>

Michael Hoffman. (2012). *The Changing Face of Fatherhood in Japan*. Thejapantimes. https://www.japantimes.co.jp/news/2012/11/11/national/media-national/the-changing-face-of-fatherhood-in-japan/#.XAnSB_nFLIU

MARUKO, M. (2014). *NPO Fathering Japan shows men how to be better dads*. Thejapantimes. <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/06/01/national/npo-fathering-japan-shows-men-better-dads/>

Ministry of Health Labour and Welfare of Japan. (2010). *Introduction to the revised Child Care and Family Care Leave Law*. <https://www.mhlw.go.jp/english/policy/affairs/dl/05.pdf>

Barbara, V. (2018). *Employees and Managers Book Subtitle : Inequalities and Capabilities , Rationalities and Politics Of ikumen and ikuboss : An Inquiry into Japan ' s New Fathers as Consumers , Employees and Managers*.

Goldstein-Gidoni, O. (2020). ‘Working fathers’ in Japan: Leading a change in gender relations?’ *Gender, Work and Organization*, 27(3), 362–378. <https://doi.org/10.1111/gwao.12380>

JAPAN DATA. (2018). *More Japanese Fathers Using Childcare Leave, Though Most Take Only a Few Days*. Nippon.Com. <https://www.nippon.com/en/features/h00340/>